

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mengembangkan kemampuan bawaan, baik fisik maupun mental, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah proses yang dirancang secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensinya. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Makna pendidikan di atas dapat disimpulkan Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, bahkan dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi setiap individu. Pendidikan adalah hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa. Untuk memenuhi hak ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan pendidikan inklusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 serta Pasal 32, disebutkan bahwa pendidikan khusus diberikan kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus, baik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, maupun yang memiliki kecerdasan luar biasa. Pendidikan inklusi

dilaksanakan di berbagai jenjang, baik dasar maupun menengah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 juga menegaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas di semua jenis, jalur, dan tingkat pendidikan.¹

Pada kenyataannya, masih banyak masalah pendidikan yang belum terselesaikan, terutama terkait pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan. Meski kualitas pendidikan di Indonesia diharapkan dapat merata bagi semua generasi, kenyataannya hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang benar-benar menikmatinya. Tidak semua anak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, dan anak-anak di daerah terpencil sering kali terpinggirkan dari sistem pendidikan yang ada.

Penyelenggaraan pendidikan harus bebas dari diskriminasi, tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional siswa. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing.² Anak-anak dengan kebutuhan khusus juga memerlukan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta menjadi lebih mandiri dalam menjalani kehidupannya. Siswa berkebutuhan khusus juga memiliki hati nurani, perasaan, dan pemikiran yang seringkali lebih peka dibandingkan dengan siswa pada umumnya. Semangat mereka dalam belajar patut diapresiasi. Hal ini menegaskan bahwa mereka

¹ Farah Arriani dkk., *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, 2022), hal 3.

² Asep Ahmad Sopandi, "Pengembangan Kurikulum bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 4 Padang dalam Setting Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pedagogi: Jurnal ilmiah Ilmu Pendidikan* XIII, no. 1 (April 2013).

layak untuk mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan prinsip pendidikan yang tidak mengenal diskriminasi, setiap anak, baik dari latar belakang kaya maupun miskin, normal maupun berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil. Pemerintah seharusnya memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa membeda-bedakan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 1,6 juta jiwa. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 menunjukkan populasi penyandang disabilitas dengan tingkat keparahan sedang dan berat mencapai 30 juta jiwa, sementara Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) mencatat sebanyak 21 juta jiwa. Pada tahun 2020, BPS mencatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar lima persen dari total populasi. Meskipun hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan telah dijamin melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, data terbaru dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per November 2024 mencatat bahwa 1,71 juta penyandang disabilitas telah menerima dukungan dari Kementerian Sosial. Dukungan tersebut meliputi Program Perumahan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, dan ATENSI.

Melihat kondisi tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan perhatian melalui pendidikan inklusif. Pendidikan ini dirancang untuk melayani semua anak, termasuk mereka yang membutuhkan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai sistem pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan atau

potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yang diselenggarakan secara terpadu dalam sekolah reguler dengan pendekatan yang sistematis.

Salah satu langkah pemerintah untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus adalah dengan menerapkan pendidikan inklusif. Dalam sistem ini, siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa reguler dalam satu ruang kelas. Namun, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian dan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam proses pembelajaran. Mengingat kemampuan belajar siswa berkebutuhan khusus berbeda dari siswa reguler, sekolah perlu mengembangkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan individu mereka. Untuk menciptakan pendidikan yang bebas dari diskriminasi, dibentuklah sekolah inklusif, di mana siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dalam satu lingkungan bahkan dalam satu kelas. Tujuannya adalah agar mereka dapat bersosialisasi, bekerja sama, dan saling membantu satu sama lain.

Setiap sekolah memerlukan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang diwujudkan dalam bentuk kurikulum. Semua kegiatan pembelajaran di sekolah harus berlandaskan pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, sekolah memiliki kebebasan untuk memodifikasi kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran masing-masing. Secara umum, kurikulum dirancang untuk membimbing siswa mencapai tingkatan pendidikan, perilaku, dan intelektual tertentu, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi bangsa.³ Hal

³ Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktek (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).

yang sama berlaku untuk sekolah inklusif. Sekolah ini harus memiliki kurikulum khusus yang mendukung proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

Kurikulum inklusif disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, hambatan, dan cara belajar setiap siswa, karena setiap siswa berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai panduan untuk merancang proses pembelajaran, mencakup kegiatan-kegiatan siswa yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, baik secara khusus maupun secara umum. Kurikulum juga digambarkan sebagai dokumen tertulis yang digunakan oleh guru dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran untuk peserta didiknya, serta sebagai rencana pembelajaran yang berlaku di suatu sekolah atau madrasah.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Endro Wahyuno, Ruminiati, dan Sutrisno menyatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan inklusif, selain menggunakan kurikulum reguler, perlu juga dikembangkan kurikulum tambahan (kurikulum plus). Kurikulum ini mencakup materi dan latihan khusus yang dibutuhkan oleh siswa berkebutuhan khusus sebagai akibat dari kondisi yang mereka miliki.⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk

⁴ Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan* (Surabaya: Kata Pena, 2014), hal. 6.

⁵ Endro Wahyuno, Rumianty, dan Sutrisno, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar," *Jurnal Sekolah Dasar* Tahun 23, no. 1 (Mei 2014): 77–84.

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan definisi ini, kurikulum memiliki dua dimensi: pertama, rencana dan pengaturan terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran, dan kedua, metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.⁶

Pendidikan inklusi adalah suatu pendekatan pendidikan yang menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya untuk belajar bersama. Menurut Hildegun Olsen, pendidikan inklusi mengharuskan sekolah untuk menerima semua anak, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional, bahasa, atau faktor lainnya. Pendidikan ini mencakup anak-anak penyandang disabilitas, anak berbakat, anak jalanan, pekerja anak, serta anak-anak yang berasal dari kelompok terpencil atau yang sering berpindah-pindah. Selain itu, juga melibatkan anak-anak dari kelompok etnis, bahasa, atau budaya minoritas, serta anak-anak yang hidup dalam kondisi kurang beruntung.⁷

Program inklusi di SD Rahmat dimulai pada tahun 2017 setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) dari Walikota. Program ini mengakomodasi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan berbagai kebutuhan seperti autisme, hiperaktif, tuna grahita, *slow learner*, *down syndrome*, dan pembelajaran lambat lainnya.⁸ Berdasarkan hasil wawancara awal dengan wakil kepala sekolah mengatakan bahwa, kurikulum di SD Rahmat masih mengikuti kurikulum reguler, namun untuk siswa ABK terdapat penyesuaian dalam penilaian dengan menggunakan rapot perkembangan.

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 (Jakarta, 2018).

⁷ Tarmansyah, *Inklusi Pendidikan untuk Semua* (Jakarta: Depdiknas, 2007), hal. 82.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Betty selaku Wakil Kepala Sekolah di SD Plus Rahmat Kota Kediri, 15 Maret 2024

Terdapat kelas khusus (kelas istimewa) dan guru pendamping untuk memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa ABK yang tidak bisa mengikuti kelas reguler. Meskipun arahan dari Dinas Pendidikan sudah ada, sekolah masih harus mencari sendiri pendekatan dan tindak lanjutnya. Guru-guru dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan pembelajaran inklusif sambil tetap memenuhi kebutuhan siswa ABK. Di SD Rahmat, bahwa setiap guru pendamping khusus (GPK) diharuskan membuat PPI (Program Pembelajaran Individual) untuk siswa yang tidak bisa mengikuti mata pelajaran reguler.

SD Plus Rahmat merupakan sekolah inklusi yang menjunjung prinsip keadilan dalam pendidikan. Sekolah ini menerima siswa dengan beragam latar belakang dan kemampuan. Oleh karena itu, SD Plus Rahmat menyusun program inklusi berupa program individu yang dirancang khusus untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus dengan tingkat kebutuhan rendah. Isi pembelajaran PPI ini masuk kedalam kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmat dan setiap guru GPK masing-masing wajib membuat PPI-nya sendiri. Isi dari PPI tersebut meliputi hambatan siswa ABK yang terdiri dari: mengenal suatu kata sampai pada makna, menghubungkan titik-titik, menghitung jumlah angka dan beberapa materi terkait hambatan *down syndrome* lainnya.

Sekolah masih menghadapi keterbatasan dalam hal ruang kelas dan fasilitas, serta kekurangan terapis. Namun, sekolah berupaya bekerja sama dengan pihak eksternal seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri bersama Ibu Sofi Mirwani (dosen psikologi) yang ikut serta mendukung program inklusi ini dengan dilakukannya *test asesment* awal oleh beliau untuk

menentukan jenis ABK dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut yang sesuai. Program inklusi di SD Rahmat Kota Kediri telah memberikan akses pendidikan kepada 20 siswa ABK dengan melibatkan 18 Guru Pembimbing Khusus (GPK). Meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala, sekolah berusaha untuk terus mengembangkan program inklusi ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siswa ABK. SD Plus Rahmat telah melakukan studi banding di SD Tulangan Yoyakarta, serta bekerja sama dengan dinas untuk mengembangkan kurikulum inklusi. Dengan adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan dan mengembangkan program inklusi, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembelajaran dan perkembangan siswa ABK di SD Rahmat Kota Kediri.

Berdasarkan paparan data diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait kurikulum yang digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus di SD Plus Rahmat Kota Kediri, terutama dari segi manajemen kurikulum regular dan PPI yang termasuk kedalam kurikulum inklusi di SD Plus Rahmat, dimana setiap GPK mempunyai tugas membimbing siswa ABK, agar bisa mengikuti mata pelajaran seperti siswa lainnya. Sehingga kurikulum tersebut dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang bersangkutan. Atas dasar itulah peneliti mengambil judul penelitian "**Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusif di SD Plus Rahmat kota Kediri**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perencanaan kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmad Kota Kediri?
2. Bagaimana Organisasi kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmad Kota Kediri?
3. Bagaimana Implementasi kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmad Kota Kediri?
4. Bagaimana Evaluasi kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmad Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perencanaan kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmad Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui Organisasi kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmad Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui Implementasi kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmad Kota Kediri.
4. Untuk mengetahui Evaluasi kurikulum pendidikan inklusi di SD Plus Rahmad Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, seperti memberi pemahaman dan informasi kepada masyarakat luas tentang manajemen kurikulum, terutama kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, serta bagaimana implementasi pendidikan inklusi di suatu lembaga.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan guru SD Plus Rahmat Kota Kediri.

2. Secara Praktis:

1) Bagi Pendidik dan atau Calon Pendidik

Pada penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambahan sekaligus sumbangan pemikiran dari penulis mengenai seluruh rangkaian dan tahapan dalam pengembangan kurikulum pada pendidikan inklusi.

2) Bagi Sekolah

Sebagai dorongan dalam meningkatkan manajemen kurikulum inklusi dengan maksimal sesuai dengan target capaian.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan maupun kajian baru, utamanya terkait program pengembangan kurikulum inklusi serta memberikan informasi dan pijakan awal untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya memerlukan kajian terhadap Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menemukan pedoman, mencari perbandingan dengan penelitian yg akan dilakukan, serta merangkum penelitian yang relevan supaya dapat menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah hasil rangkuman dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

1. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afnita Putri dengan judul "Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 3 Banda Aceh" mengungkapkan bahwa guru kelas memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Namun, para guru menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam menangani anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman antara siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler, sehingga pembelajaran yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kemampuan ABK. Selain itu, pelaksanaan pendidikan inklusi juga terkendala oleh faktor-faktor lain, seperti keterbatasan guru, dukungan dari orang tua, kesiapan sekolah, partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Persamaan : Persamaan dengan yang peneliti lakukan, terletak pada tantangan yang dihadapi, seperti penyesuaian pembelajaran untuk ABK dan keterbatasan fasilitas.

Perbedaan : Perbedaan dengan yang peneliti lakukan yaitu dengan menerapkan program individu yang dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan tingkat kebutuhan rendah. Program tersebut memungkinkan sekolah lebih fokus dalam memberikan dukungan sesuai kebutuhan setiap siswa. Hal ini menunjukkan bahwa SD Plus Rahmat telah memiliki strategi tersendiri untuk mengatasi sebagian tantangan yang ditemukan dalam penelitian Afnita Putri.⁹

2. Penelitian Siti Auliyatus Sholawati dengan judul "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi Pada Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Kalirungkut-1 Surabaya" mengungkapkan empat poin utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. 1) perencanaan pembelajaran disusun melalui silabus, RPP, dan PPI yang disesuaikan dengan hambatan tiap siswa berkebutuhan khusus (ABK). 2) pengorganisasian pembelajaran melibatkan pembagian tugas antara wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus (GPK) untuk mendampingi ABK. 3) pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui program pelayanan khusus yang mengacu pada RPP dan PPI, dengan fokus pada perkembangan siswa serta pengembangan bakat dan minat mereka. 4) evaluasi dilakukan melalui peninjauan proses pembelajaran dan hasil penilaian siswa.

Persamaan : Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah keduanya menerapkan pendidikan inklusi dengan fokus pada penyesuaian pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan ABK,

⁹ Afnita Putri, Skripsi, Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 3 Banda Aceh (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017).

serta melibatkan langkah-langkah perencanaan dan evaluasi yang mendukung perkembangan siswa. Keduanya juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan bakat dan minat siswa.

Perbedaan : Perbedaan dengan yang peneliti lakukan yaitu di SD Plus Rahmat menerapkan pendekatan program individu yang dirancang khusus untuk ABK dengan kebutuhan rendah, sehingga pembelajaran dapat lebih terarah sesuai kebutuhan setiap siswa. Di sisi lain, SDN Kalirungkut-1 Surabaya menekankan pada pengorganisasian pembelajaran dengan mengutamakan kerja sama antara wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus (GPK), sebuah strategi yang tidak secara rinci dijelaskan di SD Plus Rahmat.¹⁰

3. Penelitian Siswanto dengan judul "Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi" menyatakan bahwa Madrasah Aliyah Baitul Makmur menyediakan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, mereka menerapkan sistem pull out di kelas reguler untuk memberikan perhatian khusus kepada ABK. Madrasah ini juga menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik dan psikologi siswa. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kekurangan fasilitas, perlengkapan, dan guru yang terlatih khusus dalam menangani ABK.

¹⁰ Siti Auliyatus Sholawati, "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi Pada Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Kalirungkut-1 Surabaya," *Abdau : Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 1 (Juni 2019): hal 37-53.

Persamaan : Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah keduanya mengadaptasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan ABK dan memberikan perhatian khusus pada karakteristik masing-masing siswa. Mereka juga menghadapi masalah serupa, seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya guru yang memiliki pelatihan khusus.

Perbedaan : Perbedaan dengan yang peneliti lakukan yaitu di Madrasah Aliyah Baitul Makmur menerapkan sistem pull out untuk ABK di kelas reguler, sementara SD Plus Rahmat lebih fokus pada program individu yang dirancang khusus untuk ABK dengan kebutuhan rendah. Program ini memastikan dukungan yang lebih spesifik bagi siswa tanpa bergantung pada sistem kelas reguler.¹¹

F. Definisi Konsep

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Menurut George R. Terry yang dikutip oleh Mannulang, manajemen adalah upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan kegiatan orang lain.¹² Kurikulum merupakan program pendidikan di sekolah yang dirancang untuk siswa, di mana melalui program tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar yang mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan.¹³

¹¹ Siswanto, "Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup," *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 3, no. 2 (November 2019): hal 114-128.

¹² Mannulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1979), hal. 3.

¹³ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 10.

Manajemen kurikulum adalah keseluruhan proses yang dilakukan bersama untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas interaksi dalam proses belajar mengajar.¹⁴

2. Pengertian Pendidikan Inklusi

Menurut Hildegun Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah yang harus menerima semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional, bahasa, atau kondisi lainnya. Pendidikan ini mencakup anak-anak penyandang disabilitas dan anak berbakat.¹⁵ Sementara itu, menurut Daniel P. Hallahan, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler sepanjang hari, dengan guru bertanggung jawab penuh terhadap siswa berkebutuhan khusus tersebut.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus, dengan memberikan layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.

¹⁴ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 57.

¹⁵ Tarmansyah, *Inklusi Pendidikan untuk Semua*, hal. 82.

¹⁶ Daniel P. dkk. Hallahan, *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, cet. ke-10 (Boston: Pearson Education Inc, 2009), hal. 53.